



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 5880-5889

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Dampak Sosial Ekonomi Kerja Sama PT. Nuansa Bhaskara Cipta dengan Pengrajin Gula Kelapa (*Cocos Nucifera*) di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

Denis Andiani<sup>1</sup>, Endang Tri Astutiningsih<sup>2</sup>, Ika Sofia Rizqiani<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

[denisa222@ummi.ac.id](mailto:denisa222@ummi.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kerja sama serta dampak sosial ekonomi antara PT. Nuansa Bhaskara Cipta dengan pengrajin gula kelapa di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 35 orang pengrajin gula kelapa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama dilakukan melalui pemberian hak kelola pohon kelapa kepada pengrajin dengan sistem pembayaran natura (*in-kind rent*), yaitu pengrajin wajib menyetorkan gula kelapa kepada perusahaan sesuai jumlah pohon yang dikelola. Dalam pelaksanaannya, perusahaan hanya menyediakan aset berupa pohon kelapa, sedangkan seluruh biaya produksi dan risiko usaha ditanggung oleh pengrajin. Dampak ekonomi dari kerja sama ini memberikan akses pendapatan bagi pengrajin, namun sebagian besar pengrajin masih bergantung pada tengkulak akibat tidak adanya jaminan pasar dari perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan pengrajin rentan terjebak dalam sistem ijon dengan harga jual yang lebih rendah. Dari aspek sosial, kerja sama memberikan kepastian hak garap bagi pengrajin, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis akibat kewajiban setoran natura yang harus dipenuhi secara terus-menerus. Selain itu, belum adanya perlindungan sosial dan pendampingan yang memadai menyebabkan kondisi pengrajin masih cukup rentan secara sosial maupun ekonomi.

**Kata Kunci:** Kerja Sama, Gula Kelapa, Pembayaran Natura, Dampak Sosial Ekonomi, Pengrajin

### 1. Latar Belakang

Dalam perkembangan agribisnis modern, kerja sama antara petani kecil dan perusahaan besar menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta efisiensi rantai pasok pertanian (FAO, 2002). Dalam konteks pengrajin yang tidak memiliki lahan sendiri, kerja sama seringkali menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan akses terhadap aset produksi. Dalam skema ini, perusahaan berperan sebagai pemilik aset yang memberikan hak kelola kepada pengrajin. Pengrajin mendapatkan akses terhadap pohon nira yang sebelumnya sulit dijangkau, dengan kewajiban menyetorkan hasil produksi sebagai biaya sewa, tanpa adanya intervensi perusahaan dalam pemasaran sisa hasil panen (Meemken & Bellemare, 2019). Kerja sama agribisnis bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah keterbatasan modal dan teknologi bagi petani kecil agar mampu memproduksi secara efisien dan berkelanjutan (Erlina & Rahman, 2024). Kerja sama menjadi wadah strategis yang menjembatani hubungan antara petani dan pelaku usaha agar terbangun sistem agribisnis yang saling menguntungkan serta berkelanjutan (Purwaningsih & Sugihin, 2012).

Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi nasional mencapai  $\pm 24,5$  juta ton pada tahun 2022 (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2023). Kelapa tidak hanya menjadi bahan baku untuk minyak kelapa, tetapi juga untuk produk bernilai tambah seperti gula kelapa (*coconut sugar*) yang semakin diminati pasar domestik dan internasional karena sifatnya yang “natural” dan ramah lingkungan. segala bentuk hasil bumi merupakan karunia Allah SWT yang diberikan untuk kemaslahatan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanaman kelapa yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan manfaat ekologis, harus disertai dengan rasa syukur serta tanggung jawab dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 10–11 sebagai berikut:

Dampak Sosial Ekonomi Kerja Sama PT. Nuansa Bhaskara Cipta dengan Pengrajin Gula Kelapa (*Cocos Nucifera*) di Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١١

Artinya: “(10) Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu. (11) Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.” (QS. An-Nahl [16]: 10–11).

Ayat ini menggambarkan bahwa Allah SWT menurunkan air hujan sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk dan menumbuhkan berbagai tanaman yang menjadi sumber pangan serta rezeki manusia. Dalam konteks pertanian kelapa, ayat ini menegaskan pentingnya kesadaran spiritual terhadap keberlimpahan alam yang telah Allah ciptakan. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan bijak, tanpa merusak keseimbangan lingkungan.

Kegiatan pengrajin gula kelapa di Kecamatan Surade masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi menurunkan kesejahteraan mereka. Pendapatan rumah tangga cenderung rendah karena harga jual produk tidak stabil, yang berakibat pada keterbatasan daya beli dan risiko kemiskinan struktural (Kusumah, 2020). Akses pasar juga masih terbatas, sebagian besar gula kelapa dipasarkan secara lokal tanpa jaringan distribusi yang luas, sehingga nilai tambah produk tidak dapat dioptimalkan (BPS, 2022). Selain itu, proses produksi masih mengandalkan teknologi tradisional yang menghasilkan kualitas variatif, sehingga produk sulit memenuhi standar pasar modern (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2023). Kurangnya modal dan pelatihan mempersulit pengrajin untuk berinovasi, sementara ketergantungan pada perantara menyebabkan margin keuntungan terpotong besar-besaran (Sari & Nugroho, 2021; Mahendra, 2019). Kondisi ini diperparah dengan posisi pengrajin dalam skema kerja sama di PT. Nuansa Bhaskara Cipta. Pengrajin menghadapi beban ganda: pertama, kewajiban memenuhi kuota setoran gula sewa kepada perusahaan; dan kedua, ketergantungan mutlak pada tengkulak untuk mencairkan sisa hasil produksi menjadi uang tunai. Karena perusahaan tidak bertindak sebagai penjamin pasar (off-taker), risiko fluktuasi harga di tingkat tengkulak sepenuhnya ditanggung oleh pengrajin.

Penelitian ini selaras dengan agenda nasional Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, khususnya sasaran peningkatan pendapatan petani kecil. Selain itu, topik ini berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya Goal 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Goal 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi), melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Dari sudut pandang akademik, masih terbatas kajian empiris yang mengevaluasi dampak kerja sama perusahaan-pengrajin pada sektor gula kelapa di Indonesia (Rahmawati, 2022). Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Dalam sektor agribisnis, pelaksanaan CSR dapat diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan sarana produksi, penguatan kapasitas usaha, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris bagi PT. Nuansa Bhaskara Cipta dalam mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan CSR yang berbasis data, sekaligus menyediakan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dukungan kepada usaha mikro kecil berbasis komoditas kelapa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini urgen dilakukan untuk menganalisis dinamika kerja sama antara PT. Nuansa Bhaskara Cipta dan pengrajin. Fokus utamanya adalah melihat keseimbangan antara manfaat akses aset pohon yang diberikan perusahaan dengan beban sewa dan risiko pasar yang harus ditanggung pengrajin di tengah cengkeraman sistem tengkulak. Temuan dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program pendukung usaha mikro-kecil, serta mendorong inovasi produk melalui adopsi teknologi modern. Selain itu, memperkuat rantai nilai lokal berpotensi meningkatkan daya saing gula kelapa Surade di pasar nasional maupun internasional. Akhirnya, proses penelitian juga berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan kepada pengrajin, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja yang lebih layak.

Kerja sama juga berkontribusi pada pencapaian pembangunan pertanian berkelanjutan karena menciptakan sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di satu sisi, kerja sama ini memberikan kepastian akses lahan bagi pengrajin yang tidak punya modal tanah. Namun di sisi lain, minimnya bantuan sarana produksi (saprodi) yang rutin dan ketiadaan jaminan harga dari perusahaan menimbulkan pertanyaan mengenai kesejahteraan pengrajin. Apakah kerja sama ini benar-benar memberdayakan, atau sekadar memindahkan beban pengelolaan kepada pengrajin dengan sistem setoran natura? Kerja sama semacam ini berpotensi menghasilkan dampak sosial ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat Surade.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena sosial ekonomi akibat kerja sama antara PT. Nuansa Bhaskara Cipta dan pengrajin gula kelapa di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada konteks alamiah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dampak sosial ekonomi yang tidak dapat diukur hanya dengan data numerik. Sejalan dengan Sugiyono (2020), metode deskriptif kualitatif menekankan makna dan kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian menggunakan desain studi kasus sebagaimana dijelaskan Yin (2018), yaitu menelaah fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam.

Penelitian dilaksanakan di Desa Buniwangi dan Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, yang dipilih secara purposive karena menjadi sentra produksi gula kelapa dan lokasi utama kemitraan PT. Nuansa Bhaskara Cipta. Responden penelitian berjumlah 35 pengrajin gula kelapa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria aktif bermitra, memiliki pengalaman produksi, dan bersedia memberikan informasi. Variasi responden diperhatikan berdasarkan lama kerja sama, jumlah pohon yang dikelola, dan kondisi ekonomi rumah tangga.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2022). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kondisi sosial ekonomi pengrajin. Observasi dilakukan pada proses produksi dan penyerahan hasil panen guna mencocokkan informasi lapangan. Dokumentasi meliputi kontrak kerja sama, catatan produksi, foto kegiatan, dan profil desa.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al., (2014) yang berlangsung secara terus-menerus melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi sistematis untuk menggambarkan mekanisme kerja sama serta dampak sosial ekonomi yang terjadi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

## 3. Hasil dan Diskusi

### A. Hasil Penelitian

Bagian ini menguraikan temuan faktual yang diperoleh secara langsung dari lapangan di Desa Buniwangi dan Desa Pasiripis, Kecamatan Surade. Guna menjaga objektivitas, data disajikan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tanpa adanya interpretasi teoretis dari peneliti pada bagian ini.

#### 1) Gambaran Umum dan Karakteristik Responden

PT. Nuansa Bhaskara Cipta merupakan entitas bisnis yang bergerak di bidang agroindustri dengan fokus utama pada pengelolaan aset perkebunan kelapa di wilayah Kabupaten Sukabumi. Perusahaan ini memposisikan diri sebagai pemilik aset yang menguasai lahan produktif dan tanaman kelapa di beberapa titik strategis, termasuk di Kecamatan Surade. Deskripsi operasional perusahaan di wilayah tersebut bertumpu pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui sistem kerja sama.

Dalam menjalankan fungsinya, perusahaan tidak mengelola seluruh tanaman kelapa secara mandiri menggunakan tenaga kerja internal, melainkan memberikan hak kelola kepada pengrajin gula kelapa setempat yang tidak memiliki kepemilikan lahan. PT. Nuansa Bhaskara Cipta menyediakan akses terhadap pohon kelapa produktif agar dapat disadap oleh para mitra. Sebagai kompensasi atas penyediaan aset dan akses lahan tersebut, perusahaan menetapkan mekanisme setoran natura dalam bentuk produk fisik gula kelapa yang harus diserahkan secara berkala oleh para mitra pengrajin.

## 2) Karakteristik Responden

Penelitian ini secara konsisten mengaplikasikan metode deskriptif kualitatif murni guna membedah kompleksitas realitas kerja sama secara holistik. Penentuan responden tidak didasarkan pada populasi statistik, melainkan menggunakan teknik purposif untuk menjangkau individu yang benar-benar kredibel dan terlibat langsung dalam rantai pasok gula kelapa PT. Nuansa Bhaskara Cipta (Sugiyono, 2022). Responden dalam penelitian ini berjumlah 35 orang, yang merepresentasikan 50% dari total pengrajin mitra di wilayah penelitian. Profil demografis responden disajikan secara ringkas dalam tabel persentase berikut:

**Tabel 1.** Karakteristik Demografi Responden Pengrajin Gula Kelapa di Kecamatan Surade, 2026

| Variabel Karakteristik     | Kategori                      | Frekuensi (Orang) | Persentase (%) |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Rentang Usia (Tahun)       | 20-30                         | 4                 | 11,43          |
|                            | 31-40                         | 11                | 31,43          |
|                            | 41-50                         | 12                | 34,29          |
|                            | 51-60                         | 8                 | 22,86          |
| Tingkat Pendidikan         | SD                            | 19                | 54,29          |
|                            | SMP                           | 14                | 40,00          |
|                            | SMA                           | 2                 | 5,71           |
| Pekerjaan Lainnya          | Nelayan                       | 18                | 51,43          |
|                            | Petani                        | 13                | 37,14          |
|                            | Tidak Ada                     | 4                 | 11,43          |
| Pengalaman Bertani (Tahun) | Kurang Berpengalaman (1 – 10) | 6                 | 17,14          |
|                            | Cukup Berpengalaman (11 – 20) | 11                | 31,43          |
|                            | Sangat Berpengalaman (> 20)   | 18                | 51,43          |
| Pohon yang Dikelola        | Sedikit (< 30)                | 11                | 31,43          |
|                            | Sedang (30 – 35)              | 13                | 37,14          |
|                            | Banyak (> 35)                 | 11                | 31,43          |
| Skema Harga Jual           | Ijon/Kasbon                   | 24                | 68,57          |
|                            | Tunai Normal                  | 11                | 31,43          |

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif, yakni antara 38 hingga 52 tahun. Dalam struktur agribisnis tradisional, kelompok usia produktif ini sangat esensial karena proses penyadapan nira kelapa dari puluhan pohon menuntut ketahanan serta tenaga fisik yang optimal setiap harinya. Tingkat pendidikan mayoritas responden berada pada jenjang dasar hingga menengah. Secara empiris, keterbatasan latar belakang pendidikan formal ini kerap kali menjadi faktor penghambat dalam memahami klausul kerja sama, sehingga bermuara pada rendahnya daya tawar petani ketika berhadapan dengan struktur korporasi atau pemilik modal (Ernita & Rahman, 2024).

Selain itu, mayoritas responden memiliki pekerjaan lain, dengan 51,43% berprofesi sebagai nelayan dan 37,14% sebagai petani komoditas lain. Terkait dengan pengalaman, rata-rata pengalaman responden dalam bertani adalah 21,60 tahun, di mana lebih dari separuhnya (51,43%) masuk dalam kategori sangat berpengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan menyadap nira telah menjadi profesi yang mendarah daging secara turun-temurun, meskipun status kepemilikan lahan mereka masih bergantung pada pihak perusahaan.

Karakteristik lain yang menjadi penentu krusial dalam keputusan ekonomi responden adalah beban demografis. Berdasarkan data lapangan, rata-rata tanggungan keluarga yang dimiliki oleh petani adalah 2,56 orang, yang berkisar antara 2 hingga 5 orang. Tingginya beban demografis dalam satu pintu rumah tangga ini mendesak responden untuk memiliki aliran kas harian yang cepat. Desakan kebutuhan subsisten inilah yang membatasi fleksibilitas responden dalam menahan produk mereka, sehingga mayoritas dari mereka (68,57%) rentan memicu keterikatan pada pihak ketiga (tengkulak) melalui skema harga ijon (kasbon) yang lebih murah (Rp 13.000/kg) untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan dasar harian (Mubyarto, 1989).

Secara operasional, rata-rata pohon kelapa yang dikelola oleh setiap responden mencapai 34,89 pohon. Tingkat pengelolaan aset yang cukup tinggi ini berhubungan langsung dengan kapasitas hasil, di mana rata-rata produksi gula petani menyentuh angka 185,43 kg/bulan. Retensi kerja sama serta konsistensi produksi ini

mengindikasikan bahwa akses lahan yang diberikan oleh perusahaan memang menjadi urat nadi utama bagi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, meskipun mereka harus dihadapkan pada realitas beban sewa dan jebakan harga tengkulak.

### 3) Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama

Bagian ini mengurangi temuan faktual terkait aturan main dan kesepakatan teknis yang mengikat PT. Nuansa Bhaskara Cipta dengan pengrajin gula kelapa. Mekanisme operasional kerja sama ini bertumpu pada pertukaran akses sumber daya, di mana perusahaan menyediakan aset berupa tanaman produktif, sementara pengrajin memberikan kompensasi berupa tenaga kerja dan hasil olahan nira.

#### a. Konsep Kerja Sama dan Sistem Sewa Natura

Secara konseptual, kerja sama yang terjalin merupakan kerja sama, di mana PT. Nuansa Bhaskara Cipta hadir sebagai entitas pemilik aset yang memberikan hak kelola pohon kelapa produktif kepada masyarakat. Sebagai bentuk kompensasi atas penyediaan aset dan hak kelola tersebut, PT. Nuansa Bhaskara Cipta tidak memberlakukan sistem sewa lahan menggunakan uang tunai, melainkan menerapkan sistem sewa natura atau *In-kind Rent*. Dalam skema ini, pengrajin diwajibkan untuk menyetorkan produk fisik berupa gula kelapa secara berkala kepada pihak perusahaan sebagai biaya sewa.

#### b. Latar Belakang Pemilihan Sistem Sewa Natura

Awal mula terjalinnya dan dipilihnya sistem kerja sama ini didorong oleh realitas struktural di Kecamatan Surade, khususnya di Desa Buniwangi dan Pasiripis. Mayoritas masyarakat di wilayah tersebut memiliki keterampilan menyadap nira yang mendarah daging, namun berstatus sebagai petani gurem yang tidak memiliki lahan perkebunan mandiri. Ketiadaan modal finansial membuat pembayaran sewa dalam bentuk natura menjadi jalan keluar bagi pengrajin untuk tetap memperoleh akses lahan dan memproduksi. Di sisi lain, bagi perusahaan yang tidak mengelola seluruh tanaman kelapa secara mandiri menggunakan tenaga kerja internal, sistem ini dinilai efektif untuk mengamankan pasokan gula kelapa secara rutin tanpa harus menanggung beban operasional penyadapan harian.

#### c. Teknis Pelaksanaan dan Aturan Main di Lapangan

Pelaksanaan kerja sama di lapangan diatur melalui kesepakatan teknis yang mengatur alokasi aset, kuota setoran, hingga pembagian tanggung jawab operasional dan risiko. Hubungan timbal balik mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dapat digambarkan melalui skema berikut:



**Gambar 1.** Skema Alur Kewajiban dan Hak dalam Pola Kerja Sama PT. NBC

Berdasarkan Gambar 1, terlihat jelas bahwa PT. Nuansa Bhaskara Cipta berposisi sebagai pemilik aset yang memberikan akses hak kelola pohon kelapa sekaligus menetapkan aturan kontrak dan kuota setoran. Sebagai timbal baliknya, pengrajin menyerahkan kompensasi sewa (natura) dengan mengandalkan tenaga kerja penyadapan mereka, menyediakan alat produksi mandiri, serta menanggung segala risiko di lapangan. Secara lebih rinci, penjabaran dari skema alur operasional tersebut adalah sebagai berikut:

#### a) Alokasi Hak Kelola

Pengalokasian pohon kelapa kepada pengrajin dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing pengrajin dalam mengelola dan menyadap pohon yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pohon yang dikelola oleh setiap pengrajin bervariasi, dengan rata-rata berkisar antara 30 sampai 40 pohon kelapa per orang. Jumlah pohon yang dikelola tersebut menjadi dasar dalam penentuan kewajiban setoran gula kelapa kepada perusahaan.

#### b) Penetapan Kuota Setoran Absolut

Sebagai bentuk pembayaran atas hak kelola yang diberikan perusahaan, pengrajin diwajibkan menyerahkan gula kelapa dalam jumlah tertentu setiap bulan. Besaran setoran ditentukan berdasarkan jumlah pohon yang dikelola, yaitu sekitar 1 kilogram gula kelapa per pohon per bulan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pengrajin yang terlibat dalam kerja sama dengan PT. Nuansa Bhaskara Cipta.

c) Tanggung Jawab Sarana Produksi

Ketiadaan intervensi perusahaan dalam mendukung proses teknis produksi menjadi ciri khas pelaksanaan di lapangan. Perusahaan murni bertindak sebagai penyedia pohon, sehingga tidak menyertakan bantuan sarana produksi (saprodi) seperti wajan, kayu bakar, maupun obat pengawet nira alami. Seluruh biaya perawatan dan penyusutan inventaris ditanggung mutlak oleh pengrajin.

d) Manajemen Risiko dan Cuaca

Perusahaan tidak memberlakukan sistem pemutihan (penghapusan) kuota setoran ketika pengrajin menghadapi gagal panen atau penurunan volume nira akibat faktor alam seperti cuaca ekstrem. Perusahaan hanya memberikan kelonggaran waktu pembayaran, namun setoran natura yang menunggak tersebut tetap diakumulasikan sebagai utang yang wajib dilunasi oleh pengrajin pada periode bulan berikutnya

4) Dampak Sosial Ekonomi Kerja Sama bagi Pengrajin

Bagian ini menyajikan potret empiris mengenai konsekuensi dari pelaksanaan kerja sama terhadap tata kehidupan pengrajin. Evaluasi program kerja sama di sektor perkebunan tidak hanya diukur dari kelancaran rantai pasok bahan baku bagi perusahaan, tetapi harus membedah secara langsung perubahan kesejahteraan ekonomi dan dinamika relasi sosial yang dialami oleh masyarakat lapis terbawah (Lubis et al., 2026).

a. Dampak Ekonomi

1) Dinamika Pendapatan: Pemisahan Alur Setoran Natura dan Sisa Produksi

Kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan rumah tangga pengrajin gula kelapa sangat ditentukan oleh alur pembagian hasil produksi. Secara keseluruhan, alur pendapatan ini bermula dari total produksi kotor yang berhasil dihasilkan oleh pengrajin dari menyadap nira. Berdasarkan data di lapangan, rata-rata total produksi kotor pengrajin mencapai 185,43 kg per bulan. Namun, produksi kotor ini tidak serta-merta menjadi pendapatan utuh yang bisa dinikmati oleh pengrajin. Hasil produksi tersebut wajib dipisahkan ke dalam dua alur utama, yakni alur "Kewajiban Setoran" untuk pihak perusahaan dan alur "Sisa Produksi" yang menjadi hak pengrajin.

Alur pertama adalah Kewajiban Setoran kepada PT. Nuansa Bhaskara Cipta. Setoran ini merupakan proporsi gula kelapa yang sifatnya wajib dan harus diprioritaskan untuk diserahkan ke perusahaan sebagai bentuk pembayaran atas hak kelola pohon kelapa. Rata-rata gula yang harus disetorkan oleh pengrajin untuk masuk ke PT. Nuansa Bhaskara Cipta adalah sebesar 34,89 kg per bulan. Setelah kewajiban mutlak ini terpenuhi, barulah pengrajin masuk ke alur kedua, yaitu mendapatkan Sisa Produksi. Sisa produksi inilah yang menjadi hak penuh pengrajin, dengan rata-rata sebesar 150,54 kg per bulan. Sisa gula inilah yang kemudian menjadi satu-satunya sumber yang akan dijual untuk dikonversi menjadi pendapatan berupa uang tunai.

Dalam menjual sisa produksinya, pengrajin dihadapkan pada dua pilihan muara pasar, yaitu menjual langsung ke pasar dengan harga normal atau menjual kepada tengkulak. Sayangnya, tidak semua pengrajin mampu menjual langsung ke pasar. Proses pembuatan gula kelapa memakan waktu dan tenaga penuh setiap harinya, sementara kebutuhan pokok rumah tangga (seperti beras, minyak, dan lauk pauk) sangat mendesak untuk dipenuhi saat itu juga. Karena ketiadaan modal uang tunai untuk berbelanja harian, banyak pengrajin terpaksa mengambil bahan kebutuhan pokok terlebih dahulu dari warung atau bandar lokal (tengkulak) dengan sistem kasbon atau meminjam uang di muka. Praktik meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup inilah yang melahirkan sistem ijon.

Sebagai kompensasi atas pinjaman di muka tersebut, tengkulak mengikat pengrajin dan mewajibkan mereka untuk menyetorkan sisa produksi gula kelapanya secara eksklusif kepadanya. Dalam relasi utang-piutang ini, tengkulak memiliki kuasa penuh untuk memotong harga beli secara sepihak. Sisa gula milik pengrajin yang memiliki utang hanya dihargai sebesar Rp 13.000/kg, jauh lebih rendah dibandingkan harga jual normal di pasar yang mencapai Rp 15.000/kg. Rincian alur penjualan dan perbedaan pendapatan akibat dinamika relasi pasar tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 2.** Perbandingan Pendapatan Aktual Pengrajin Gula Kelapa berdasarkan Seluruh Pemasaran di Kecamatan Surade, 2026

| Variabel Indikator            | Tengkulak | Pasar  |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Harga Jual (Rp/Kg)            | 13.000    | 15.000 |
| Rata-rata Pohon Dikelola      | 35,54     | 33,45  |
| Rata-rata Produksi Kotor (Kg) | 188,33    | 179,09 |

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Kewajiban Setoran PT. NBC (Kg) | 35,54     | 33,45     |
| Sisa Gula untuk Dijual (Kg)    | 152,79    | 145,64    |
| Pendapatan Aktual (Rp)         | 1.986.292 | 2.184.545 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 2, terlihat ironi yang nyata pada kondisi ekonomi pengrajin. Kelompok pengrajin yang terpaksa menjual ke tengkulak sebenarnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi; mereka mengelola pohon lebih banyak dan menghasilkan produksi kotor yang lebih besar (188,33 kg). Namun, karena mereka telah terjatuh dalam sistem ijon yang memotong harga jual menjadi Rp 13.000/kg, pendapatan aktual yang mereka peroleh hanya sebesar Rp 1.986.292 per bulan. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pengrajin yang bebas dari jerat utang dan mampu menjual sisa gulanya secara normal ke pasar (Rp 15.000/kg), di mana kelompok ini berhasil mendapatkan pendapatan Rp 2.184.545 per bulan meskipun volume sisa gulanya secara fisik lebih sedikit. Hal ini menegaskan bahwa keunggulan volume produksi dari hasil menyadap nira menjadi tidak berarti akibat tingginya potongan harga yang harus ditanggung pengrajin akibat ketergantungan modal pada tengkulak.

## 2) Ketergantungan Pasar dan Jeratan Utang Tengkulak

Ketimpangan pendapatan sebagaimana diuraikan di atas berakar dari ketiadaan peran PT. Nuansa Bhaskara Cipta sebagai penjamin pasar (*off-taker*) untuk sisa hasil produksi. Kondisi ini menyebabkan pengrajin harus mencari saluran distribusi secara mandiri, yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan pasar secara absolut kepada perantara lokal atau tengkulak. Peta relasi ketergantungan modal antara pengrajin dan tengkulak dapat digambarkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Peta Relasi Ketergantungan Modal antara Pengrajin dan Tengkulak

Berdasarkan Gambar 2 terlihat jelas bahwa pengrajin berpotensi sebagai *price taker* tanpa memiliki *bargaining power*. Keterdesakan ekonomi memaksa sebagian besar pengrajin untuk melakukan praktik ijon, berupa pengambilan bahan kebutuhan pokok dari tengkulak yang dibayar menggunakan pemotongan sisa gula. Praktik relasi utang ini dikenai penalti harga secara sepihak, dimana tengkulak menghargai gula dari pengrajin yang berutang sebesar Rp. 13.000/kg, jauh lebih rendah dari harga normal lokal maupun harga pasar di kota. Dinamika transaksi dan disparitas harga di tingkat desa tergambar pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. Variasi Harga Jual Kelapa di Tingkat Tengkulak di Kecamatan Surade, 2026

| Jenis Transaksi                   | Harga di Tingkat Pengrajin | Harga Pasar | Margin Keuntungan Tengkulak | Keterangan / Implikasi  |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|---|
| Jual Beli Tunai (Rp / Kg)         | 15.000                     | 19.000      | 4.000                       | Pengrajin bertindak sebagai <i>price taker</i> tanpa daya tawar |
| Jual Beli Potong Kasbon (Rp / Kg) | 13.000                     | 19.000      | 6.000                       | Tengkulak menekan harga beli lebih rendah (penalti Rp 2.000/Kg) |

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

## b. Dampak Sosial

### 1) Keamanan Aset dan Tekanan Psikologis Pengrajin

Di luar aspek finansial, kerja sama ini memengaruhi konstelasi sosial dan melahirkan krisis rasa aman terhadap aset di kalangan pengrajin. Temuan lapangan mengindikasikan adanya kecemasan laten di kalangan pengrajin mengenai status hak garap mereka. Mengingat kuota setoran natura bersifat absolut, terdapat kekhawatiran yang nyata bahwa perusahaan dapat memberlakukan sanksi pencabutan hak kelola secara sepihak bagi individu yang gagal memenuhi target bulanan. Ketiadaan jaminan keamanan aset jangka panjang ini menempatkan pengrajin di

bawah tekanan psikologis yang konstan untuk terus memproduksi melampaui kapasitas mereka, terlepas dari kondisi fisik maupun iklim.

## 2) Dinamika Relasi Sosial dan Ketiadaan Kelembagaan

Tekanan psikologis terkait target setoran dan keamanan aset tersebut semakin terasa berat akibat absennya kelembagaan yang fungsional di tingkat desa. Kerja sama ini tidak diiringi dengan ketersediaan jaring pengaman sosial, baik berupa program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak perusahaan, maupun dukungan kolektif dari sesama pengrajin.

Ketika seorang pengrajin mengalami musibah, kendala fisik, atau jatuh sakit, beban pemenuhan kuota setoran natura tidak mendapatkan keringanan atau pemutihan. Beban tersebut mutlak diakumulasikan sebagai tunggakan yang wajib dilunasi secara individual pada periode berikutnya. Fenomena ini secara jelas menunjukkan absennya perlindungan sosial kolektif di tingkat akar rumput. Setiap pengrajin dibiarkan berjuang dan menanggung beban risiko eksklusi secara perorangan. Praktik kerja sama ini justru memperlihatkan tingginya kerentanan individu akibat lemahnya kelembagaan formal (seperti kelompok tani) dan absennya ikatan saling menanggung (solidaritas) antarsesama mitra pekerja di lapangan.

## 5) Pembahasan

Bagian ini mendiskusikan secara kritis temuan-temuan empiris yang telah diuraikan pada bagian hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan mengonfrontasikan fakta lapangan terhadap kerangka teoretis untuk menilai apakah implementasi kerja sama di Kecamatan Surade ini sejalan, memperkuat, atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip ideal kerja sama agribisnis.

### 1. Analisis Kritis Praktik Kerja Sama dan Pembayaran Natura

Praktik penyerahan hak kelola pohon yang diiringi dengan kewajiban setoran gula kelapa secara konseptual merupakan manifestasi dari sistem Pembayaran Natura (*In-kind Rent*). Mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Otsuka (2007), sistem ini sejatinya dirancang sebagai mekanisme berbagi risiko (*risk-sharing*) antara pemilik aset (*landlord*) dan penggarap (*tenant*), di mana fluktuasi hasil panen idealnya ditanggung secara proporsional oleh kedua belah pihak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan temuan yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *In-kind Rent* tersebut. Kebijakan PT. Nuansa Bhaskara Cipta yang menetapkan target setoran absolut ( $\pm 1$  kg/pohon/bulan) dan mengakumulasikan utang setoran pada musim kemarau membuktikan bahwa perusahaan melepaskan diri dari segala bentuk risiko produksi. Sistem ini memperlihatkan asimetri kekuasaan di mana korporasi mengeksploitasi akses lahan untuk mengamankan bahan baku secara konstan, sementara beban kerugian ekologis ditanggung secara sepihak oleh pengrajin (Hestiningtyas et al., 2022).

Lebih lanjut, anomali kerja sama ini semakin terlihat ketika dievaluasi menggunakan parameter *contract farming* dari Eaton & Shepherd, (2001). Menurut mereka, kerja sama agribisnis yang efektif dan saling menguntungkan, terutama dalam model *resource-providing contract*, mewajibkan perusahaan inti untuk tidak hanya menyediakan aset dasar, tetapi juga menyuplai input pendukung untuk menekan beban produksi mitra penggarap. Berdasarkan temuan di lapangan, ketiadaan bantuan sarana produksi (saprodi) seperti wajan, kayu bakar, maupun pendampingan teknologi dari pihak perusahaan mengindikasikan bahwa kontrak yang berjalan sangat lemah secara kelembagaan. Hal ini sejalan dengan temuan Ernita & Rahman, (2024) yang menegaskan bahwa kerja sama yang hanya berorientasi pada ekstraksi hasil tanpa dibarengi dengan transfer teknologi dan penyediaan input fisik cenderung menggagalkan upaya peningkatan kapasitas produktivitas petani.

Dengan demikian, dapat disintesis bahwa alih-alih memberdayakan pengrajin melalui akses sumber daya, mekanisme Sewa Kelola Aset yang diterapkan oleh PT. Nuansa Bhaskara Cipta justru menciptakan bentuk eksploitasi gaya baru. Kepastian hak garap yang diberikan tidak ekuivalen dengan beban operasional yang harus dipikul oleh pengrajin. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa tanpa adanya regulasi kontrak yang jelas mengenai distribusi risiko dan penyediaan saprodi, kerja sama agribisnis hanya akan melestarikan posisi rentan petani kecil di hadapan pemilik modal kapital (Widayanti et al., 2024).

### 2. Dilema Kesejahteraan Ekonomi: Akses Aset vs. Jeratan Tengkulak

Paradigma dasar dari sebuah kerja sama agribisnis adalah terciptanya hubungan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (*mutual benefit*) antara perusahaan dan petani berskala kecil (Susilowati et al., 2019). Kerja sama yang ideal seharusnya mampu meminimalisasi ketidakpastian melalui integrasi vertikal, mulai dari penyediaan sarana hingga jaminan pemasaran. Namun, temuan di lapangan memperlihatkan sebuah anomali struktural; PT. Nuansa Bhaskara Cipta hanya bertindak sebagai penyedia aset

produksi (pohon) tanpa mengambil peran strategis sebagai penjamin pasar (*off-taker*) bagi sisa hasil produksi mitranya. Ketidakhadiran perusahaan di sektor hilir ini menyebabkan pengrajin harus menanggung risiko pasar secara mandiri, sebuah kondisi yang secara fundamental bertentangan dengan esensi perlindungan dalam kontrak agribisnis (Ernita & Rahman, 2024).

Konsekuensi logis dari vakumnya peran *off-taker* tersebut adalah terciptanya ruang eksploitasi oleh struktur perantara lokal atau tengkulak. Berdasarkan data empiris (lihat Tabel 3.3), pengrajin yang dihadapkan pada desakan kebutuhan subsisten terpaksa melepas 81-82% sisa produksinya ke tangan tengkulak dengan posisi tawar yang sangat marginal. Dilema ini semakin mengkrystal ketika pengrajin terjatuh dalam sistem ijon (kasbon bahan pokok), di mana tengkulak memberlakukan penalti harga beli secara sepihak hingga menyentuh angka Rp 13.000/kg. Praktik penekanan harga ini sejalan dengan analisis Mubyarto, (1989) mengenai ekonomi pedesaan, di mana ketergantungan modal petani kecil terhadap struktur informal (*moneylender* atau tengkulak) selalu berujung pada ekstraksi surplus ekonomi yang tidak proporsional oleh pemilik modal.

Fakta empiris ini secara lugas membantah asumsi umum bahwa kerja sama secara otomatis akan mengerek pendapatan petani secara signifikan. Meskipun literatur terdahulu seperti Warning & Key, (2002) mengklaim bahwa kerja sama dapat meningkatkan pendapatan hingga 25-40% karena kepastian pasar, kasus di Kecamatan Surade justru menunjukkan lahirnya fenomena kesejahteraan semu. Akses lahan memang berhasil menekan angka pengangguran terbuka, namun nilai tambah ekonomi dari komoditas gula kelapa justru terserap habis oleh selisih margin tengkulak. Akibatnya, alih-alih mencapai kemandirian finansial, pengrajin gula kelapa justru berputar dalam siklus kemiskinan struktural, di mana mereka bekerja sekadar untuk melunasi utang masa lalu tanpa memiliki kapasitas akumulasi modal untuk masa depan (Hestiningtyas et al., 2022).

### 3. Kerentanan Sosial di Tengah Absennya Kelembagaan Pengrajin

Aspek sosial dari sebuah kerja sama agribisnis sejatinya merupakan cerminan dari tingkat pemberdayaan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Menurut Mardikanto & Soebiato, (2017), indikator utama keberhasilan pemberdayaan petani tidak semata-mata diukur dari akumulasi finansial, melainkan dari peningkatan kapasitas pengambilan keputusan, kemandirian manajerial, serta penguatan institusi lokal. Namun, konfrontasi antara teori tersebut dengan realitas empiris di Kecamatan Surade justru memperlihatkan dinamika yang bertolak belakang. Implementasi Pola Kerja Sama Sewa Kelola Aset oleh PT. Nuansa Bhaskara Cipta secara tidak langsung telah menciptakan bentuk subordinasi baru. Posisi pengrajin yang terus-menerus berada di bawah tekanan pemenuhan kuota setoran absolut tanpa adanya ruang negosiasi, pendampingan, atau kehadiran jaminan sosial (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan, mereduksi otonomi mereka sebagai mitra yang seharusnya sejajar.

Lebih jauh, tekanan struktural dari rancangan kontrak yang kaku tersebut justru semakin mengekspos tingginya kerentanan sosial di tingkat akar rumput. Temuan faktual mengindikasikan bahwa ketiadaan kelembagaan formal (seperti kelompok tani) tidak lantas digantikan oleh tumbuhnya solidaritas mekanik maupun jaring pengaman informal antar-pengrajin. Ketika seorang anggota mengalami kendala fisik, sakit, atau gagal memenuhi kuota setoran, beban tersebut mutlak menjadi akumulasi utang perorangan tanpa adanya intervensi bantuan dari komunitas. Kondisi ini secara langsung membantah pandangan ideal Hubeis, (2012) yang mengasumsikan bahwa ikatan kekerabatan dan kedekatan sosial di pedesaan selalu mampu berfungsi sebagai instrumen pelindung bagi anggotanya dalam mereduksi biaya transaksi dan menghadapi asimetri kekuasaan. Sebaliknya, absennya kelembagaan komunal dan minimnya kohesi sosial ini justru membuat posisi tawar (*bargaining power*) pengrajin semakin terfragmentasi dan teralienasi ketika berhadapan dengan struktur korporasi.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disintesis bahwa kerja sama PT. Nuansa Bhaskara Cipta tidak hanya gagal mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi petani yang formal, tetapi juga membiarkan pengrajin berjuang secara individualis menghadapi beban kerja sama. Energi dan fokus pengrajin sepenuhnya terkuras secara perorangan hanya untuk memenuhi utang natura dan mengamankan aset produksi dasar dari ancaman pencabutan hak garap. Kesimpulan ini memperkuat temuan Hestiningtyas et al., (2022) dan Lubis et al., (2026) yang menggarisbawahi bahwa kerja sama agroindustri yang mengabaikan aspek pendampingan sosial dan intervensi kelembagaan serta membebankan risiko mutlak kepada individu hanya akan memelihara dan mereproduksi kerentanan kelas pekerja tanpa pernah mewujudkan kemandirian sosial-ekonomi yang utuh.

### 4. Kesimpulan

Mekanisme kerja sama antara PT. Nuansa Bhaskara Cipta dengan pengrajin gula kelapa dilakukan melalui pemberian hak kelola pohon kelapa kepada pengrajin dengan sistem pembayaran natura, yaitu pengrajin wajib menyetorkan gula kelapa kepada perusahaan sesuai jumlah pohon yang dikelola. Dalam pelaksanaannya, perusahaan hanya menyediakan aset berupa pohon kelapa, sedangkan proses produksi dan risiko usaha

ditanggung oleh pengrajin. Dampak ekonomi dari kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi pengrajin karena mereka tetap memiliki akses untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Namun, pengrajin masih bergantung pada tengkulak akibat tidak adanya jaminan pasar dari perusahaan, sehingga banyak pengrajin terjebak dalam sistem ijon dengan harga jual yang lebih rendah. Dampak sosial dari kerja sama ini memberikan kepastian hak garap bagi pengrajin, tetapi juga menimbulkan tekanan akibat kewajiban setoran yang harus dipenuhi setiap bulan. Selain itu, belum adanya pendampingan, kelembagaan pengrajin, dan perlindungan sosial menyebabkan kondisi pengrajin masih cukup rentan secara sosial maupun ekonomi.

## Referensi

1. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2023). Outlook Komoditas Kelapa 2023. Jakarta: Kementerian Pertanian.
2. Ernita, & Rahman, A. (2024). Pembangunan pertanian dan kemitraan agribisnis berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. *Jurnal Media Akademik*, 2(1), 45–56.
3. Purnaningsih, N., & Sugihen, B. (2012). Manfaat Keterlibatan Petani dalam Pola Kemitraan Agribisnis Sayuran di Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 8(2), 1–13.
4. Kusumah, A. (2020). Dampak Ekonomi Kerja Sama Perusahaan Agro-Industri dengan Petani Kecil. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 87–102.
5. Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Pertanian 2022. Jakarta: BPS.
6. Sari, D., & Nugroho, H. (2021). Pengembangan Kapasitas Teknologi pada Pengrajin Gula Kelapa. *Prosiding Konferensi Teknologi Pertanian*, 9, 45–53.
7. Mahendra, I. (2019). Peran Perantara dalam Rantai Pasok Kelapa. *Jurnal Agribisnis*, 8(1), 55–68.
8. Rahmawati, L. (2022). Evaluasi Program CSR di sektor perkebunan kelapa. Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada.
9. S. Rahman & A. Wijaya (2021). Sustainable Rural Development through Public-Private Partnerships. *International Journal of Rural Development*, 12(3), 214–230.
10. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2023). Outlook Komoditas Kelapa 2023. Kementerian Pertanian.
11. Sari, R., & Nugroho, H. (2021). Analisis rantai nilai gula kelapa di Jawa Barat. *Jurnal Agribisnis* 12(3), 45–60.
12. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*. Pearson.
13. World Bank (2023). *World Development Indicators: Coconut Products*.
14. Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
15. Boone, H. N., & Boone, D. A. (2012). Analyzing likert data. *Journal of Extension*, 50(2), 1–5.
16. Eaton, C., & Shepherd, A. (2001). Contract Farming: Partnerships for Growth. *FAO Agricultural Services Bulletin*.
17. Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment–trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20–38.
18. Eaton, C., & Shepherd, A. W. (2001). *Contract Farming: Partnership for Growth*. *FAO Agricultural Services Bulletin*.
19. Ernita, A., & Rahman, D. (2024). Pembangunan Pertanian dan Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Media Akademik*, 2(1), 1231–1242. <https://doi.org/10.62281/v2i1.101>
20. Hestiningtyas, I. D., Putri, D. D., & Nurdiani, U. (2022). Pengaruh Kemitraan terhadap Loyalitas Anggota Kelompok Tani Lereng Slamet dengan PT Indo Agroforestry di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 6(3), 994. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.20>
21. Hubeis, A. V. S. (2012). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa* (2nd ed.). IPB Press.
22. Lubis, M. K., Zebua, Y., & Nasution, M. F. (2026). Pengaruh Positif Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit di Sei Daun. *Jurnal Ekonomi, Akutansi Dan Manajemen Nusantara*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.55338/jeama.v5i1.499>
23. Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Edisi Revisi)* (4th ed.). Alfabeta.
24. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
25. Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian* (I. Hadad (ed.); 3rd ed.). LP3ES.
26. Otsuka, K. (2007). Chapter 51 Efficiency and Equity Effects of Land Markets. In R. Evenson & P. Pingali (Eds.), *Agricultural Development: Farmers, Farm Production and Farm Markets* (Vol. 3, pp. 2671–2703). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0072\(06\)03051-9](https://doi.org/10.1016/S1574-0072(06)03051-9)
27. Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
28. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.
29. Susilowati, K. D. S., Rachmi, A., & Riwijanti, N. I. (2019). *Pertanian Kontrak (Contract Farming): Model, Potensi dan Permasalahan* (1st ed.). Media Nusa Creative.
30. Warning, M., & Key, N. (2002). The Social Performance and Distributional Consequences of Contract Farming: An Equilibrium Analysis of the Arachide de Bouche Program in Senegal. *World Development*, 30(2), 255–263. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00104-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00104-8)
31. Widayanti, R., Widiastuti, L., & Sutioningsih. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Pengrajin Gula Nira Kelapa melalui Kualitas Pola Tanam Kelapa, Diversifikasi Olahan Produk, Digital Marketing dan Kemasan Produk di Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. *Jurnal Budimas*, 6(3), 1–14.